



# **KAMI VOKASI**

*WE ARE VOCATIONAL  
EDUCATION*



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2023



# **KAMI VOKASI**

*WE ARE VOCATIONAL  
EDUCATION*



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2023

# KAMI VOKASI

WE ARE VOCATIONAL EDUCATION

Pengarah	: Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. Dr. Wartanto Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T. Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd. Muhammad Fajar Subkhan, S.T., M.T. Uuf Brajawidagda, Ph.D.	<i>Steering Committee</i>	: Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. Dr. Wartanto Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T. Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd. Muhammad Fajar Subkhan, S.T., M.T. Uuf Brajawidagda, Ph.D.
Penanggung Jawab	: Saryadi, S.T., M.B.A. Cecep Somantri, Ph.D.	<i>Supervisors</i>	: Saryadi, S.T., M.B.A. Cecep Somantri, Ph.D.
Penyusun	: Febriani Dyas Utami, M.E. Nanik Ismawati Agus Saptono, M.B.A. Nur Arifin, S.Si.	<i>Contributors</i>	: Febriani Dyas Utami, M.E. Nanik Ismawati Agus Saptono, M.B.A. Nur Arifin, S.Si.
Penelaah	: Eva Komalasari, S.T. Kristiani, M.Pd. Agung Sulistomo, S.E. Habib Prastyo, M.Pd. Ratnasari Dewi, S.I.Kom.	<i>Reviewers</i>	: Eva Komalasari, S.T. Kristiani, M.Pd. Agung Sulistomo, S.E. Habib Prastyo, M.Pd. Ratnasari Dewi, S.I.Kom.
Desain Artistik	: Dhoni Nurcahyo Ahmad Syaiful Anwar Hendi Setio Nugroho	<i>Artistic Designers</i>	: Dhoni Nurcahyo Ahmad Syaiful Anwar Hendi Setio Nugroho
Sekretariat	: Teguh Susanto, S.E. Fajar Gumelar, S.Kom. Rina Yesicca Agustin, S.I.Kom.	<i>Secretariat</i>	: Teguh Susanto, S.E. Fajar Gumelar, S.Kom. Rina Yesicca Agustin, S.I.Kom.
Alih Bahasa	: Cecep Somantri, Ph.D.	<i>Translation</i>	: Cecep Somantri, Ph.D.
Foto	: Dokumen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	<i>Photo</i>	: <i>Documentation of the Directorate General of Vocational Education</i>
Ukuran Buku	: 279,4 mm x 279,4 mm	<i>Book Size</i>	: 279.4 mm x 279.4 mm
Jumlah Halaman	: 92 halaman	<i>Number of Pages</i>	: 92 pages



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2023



“Supaya bonus demografi bisa kita manfaatkan, maka kuncinya adalah langkah perbaikan, reformasi di pendidikan, dan pelatihan vokasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.”

- Joko Widodo -

*“To harness the demographic dividend, the key lies in the steps of improvement, reforms in education, and vocational training carried out in a comprehensive and integrated manner.”*

- Joko Widodo -





# DAFTAR ISI

## CONTENTS

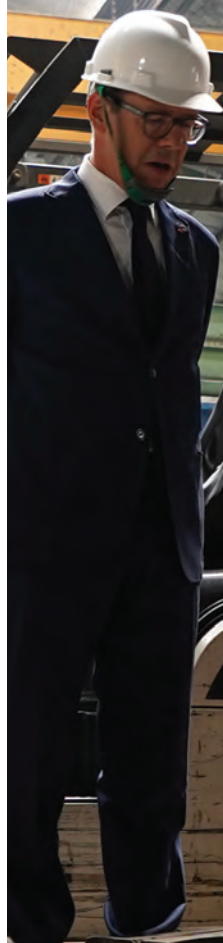
- 1** TRANSFORMASI  
PENDIDIKAN VOKASI  
UNTUK NEGERI  
*TRANSFORMING  
VOCATIONAL  
EDUCATION FOR THE  
NATION*
- 9** MEREKAM JEJAK  
PENDIDIKAN  
VOKASI  
*TRACING VOCATIONAL  
EDUCATION*
- 21** STRUKTUR  
ORGANISASI  
*ORGANIZATIONAL  
STRUCTURE*
- 60** IKHTIAR MENUJU  
KEMAJUAN  
*EFFORTS TOWARD  
DEVELOPMENT*
- 79** PENUTUP  
*CLOSING*





# TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASI UNTUK NEGERI

*TRANSFORMING  
VOCATIONAL  
EDUCATION FOR  
THE NATION*





## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

*FOREWORD BY DIRECTOR GENERAL OF VOCATIONAL EDUCATION*

Indonesia berkeinginan melompat dari negara berkembang menjadi negara maju pada 2045. Memanfaatkan bonus demografi, pemerintah telah menyusun peta jalan Indonesia Maju 2045. Transformasi dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi salah satu pilar penting sekaligus tumpuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Banyak negara telah membuktikan betapa kemajuan pendidikan vokasi telah menjadi resep mujarab untuk tumbuh menjadi negara maju. Beberapa negara seperti Swiss, German, dan China setidaknya menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi yang maju dapat menjadi tulang punggung bagi kemajuan negara mereka.

Potensi Indonesia untuk mengembangkan vokasi sangat besar. Saat ini, kita memiliki sekitar 2.000 perguruan tinggi vokasi, 14.000 sekolah menengah kejuruan, dan lebih dari 17.000 lembaga kursus dan pelatihan. Jumlah tersebut merupakan

aset yang sangat berharga dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul berdaya saing untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

Saat ini, upaya yang ditempuh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan mentransformasi pendidikan vokasi melalui berbagai program-program unggulan, seperti SMK Pusat Keunggulan, Matching Fund, Competitive Fund, dan sebagainya. Program-program yang dikemas dalam payung besar bernama Merdeka Belajar tersebut, diharapkan dapat mentransformasikan pendidikan vokasi di Indonesia menjadi lebih relevan dengan berbagai dinamika perkembangan dan kemajuan zaman, tidak hanya hari ini tetapi juga di masa depan. Dengan demikian, pendidikan vokasi dalam memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai tulang punggung untuk menyongsong cita-cita besar, Indonesia Maju 2045.

*Kiki Yuliati*

**“PENDIDIKAN VOKASI MENJADI SOLUSI KONKRET DALAM UPAYA PEMBANGUNAN SDM YANG BERKUALITAS YANG AKAN MENJADI AKSELERATOR PERTUMBUHAN EKONOMI BANGSA.”**



***“VOCATIONAL  
EDUCATION  
BECOMES A  
CONCRETE  
SOLUTION IN  
THE EFFORT TO  
DEVELOP QUALITY  
HUMAN RESOURCES  
THAT WILL ACT  
AS THE NATION’S  
ECONOMIC  
GROWTH  
ACCELERATOR.”***





## SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

FOREWORD BY DIRECTOR GENERAL OF VOCATIONAL EDUCATION

*Indonesia aspires to leap from a developing country to an advanced nation by 2045. Leveraging its demographic bonus, the government has formulated the roadmap “Advanced Indonesia 2045,” in which the transformation and revitalization of vocational education serve as a crucial pillar and foundation for enhancing Indonesia’s superior and competitive human resources.*

*Many countries have proven that vocational education progress is a successful recipe for becoming an advanced nation. Countries like Switzerland, Germany, and China, among others, serve as evidence that advanced vocational education can be the backbone of their progress.*

*Indonesia has tremendous potential for developing vocational education. Currently, the country has approximately 2,000 vocational higher education institutions, 14,000 vocational high schools (SMK), and over 17,000 training and course*

*institutions. These numbers represent valuable assets with great potential to be developed in order to produce competitive and superior human resources that can drive Indonesia’s economy.*

*Currently, the Directorate General of Vocational Education, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is making efforts to enhance human resources by transforming vocational education through various flagship programs, such as the Center of Excellence Vocational High Schools, Matching Fund, Competitive Fund, and others. These programs, packaged under the umbrella of “Merdeka Belajar” (Emancipated Learning), are expected to transform vocational education in Indonesia to be more relevant to the dynamic developments and advancements of our time, not only today but also in the future. Thus, vocational education fulfils its role and responsibility as the backbone in pursuing the ambitious vision of “Advanced Indonesia 2045.”*

*Kiki Yulianti*



DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI

WERDEKA  
MELAJU



# Dialog Bersama Mas Menteri Menuju Kemandirian Perguruan Tinggi Vokasi Negeri Melalui PTNBH

Jakarta, 13 April 2023









# MEREKAM JEJAK PENDIDIKAN VOKASI

*TRACING  
VOCATIONAL  
EDUCATION*



**P**endidikan kejuruan atau vokasional sejatinya bukan hal baru di Indonesia. Sejarah pendidikan vokasi telah merentang panjang, bahkan sejak masa kolonial.

Dirunut dari sejarahnya, pemerintah VOC sudah menyelenggarakan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang berfokus pada penyiapan lulusannya agar siap bekerja sesuai bidang keahliannya. Jenis pendidikan yang diberikan adalah pelatihan kompetensi yang lebih bersifat praktikal.

Sebelum didirikan sekolah-sekolah keagamaan seperti seminari, Belanda terlebih dahulu mendirikan Akademi Pelayaran (Academie der Marine) sebagai bentuk sekolah yang berorientasi kejuruan pada tahun 1743. Akan tetapi, sekolah tersebut ditutup pada 1755.

Pada tahun 1853 Belanda mendirikan sekolah kejuruan Ambachtsschool van Soerabaia (Sekolah Pertukangan Surabaya). Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak Indo dan Belanda. Sekolah serupa kembali dibangun di Jakarta pada 1856.

## ***DARI KOMPENI SAMPAI JOKOWI***

**1853**

*Belanda mendirikan sekolah kejuruan Ambachts school van Soerabaia (Sekolah Pertukangan Surabaya). Sekolah serupa kembali dibangun di Jakarta pada 1856.*

**1860**

*Pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Pertukangan di Surabaya untuk golongan Eropa. Dari pertukangan, pendidikan kejuruan kemudian berkembang lagi pada kejuruan pertanian dan teknik yang mengembangkan keahlian, seperti keahlian bangunan, keahlian pertambangan, pendidikan masinis, dan lain-lain.*

**1940**

*Terdapat sekitar 88 sekolah kejuruan di Indonesia dengan 13.230 siswa, umumnya dalam bidang pertukangan, teknik, dan pertanian.*

**1743**

*Belanda mendirikan Akademi Pelayaran (Academie der Marine) sebagai bentuk sekolah yang berorientasi kejuruan pada tahun 1743. Akan tetapi, sekolah tersebut ditutup pada 1755.*



**1942**

*Jepang mendirikan Sekolah Bahasa Nippon Tinggi Surabaya, Sekolah Menengah Teknik Surabaya, dan Sekolah Bahasa Nippon Sawahan Surabaya.*

Selang beberapa tahun kemudian, Pemerintah Hindia Belanda kembali membuka Sekolah Pertukangan di Surabaya untuk golongan Eropa tahun 1860.

Dari pertukangan, pendidikan kejuruan kemudian berkembang lagi pada kejuruan pertanian dan teknik yang mengembangkan keahlian, seperti keahlian bangunan, keahlian pertambangan, pendidikan masinis, dan lain-lain. Sekolah keputrian juga turut dibangun. Pendidikan yang awalnya oleh pemerintah Belanda hanya untuk kebangsaan Eropa

dan China, akhirnya dikembangkan juga untuk masyarakat pribumi.

Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda, pada tahun 1940 terdapat sekitar 88 sekolah kejuruan di Indonesia dengan 13.230 siswa, umumnya dalam bidang pertukangan, teknik, dan pertanian.

Setelah era kemerdekaan, pendidikan kejuruan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan sekolah-sekolah di tanah air. Dalam level pendidikan menengah atas, pendidikan kejuruan dikenal sesuai bidang kompetensi kejuruannya seperti STM (Sekolah Teknik Menengah), SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), dan SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga).

Melalui kebijakan Keterkaitan dan Kesepadanan (*link and match*) yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Djojonegoro, pengelolaan sekolah kejuruan dilakukan melalui pendidikan sistem ganda (*dual system*) dengan inti kegiatan berupa magang yang ditunjang sarana prasarana yang memadai. Hal tersebut selaras dengan tujuan kelembagaan sekolah kejuruan menurut Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.

Pada tahun 1997 Mendikbud Wardiman pun mengeluarkan Keputusan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK. Sejak itu semua jenis sekolah kejuruan menengah tingkat atas (SMKTA) disebut sekolah menengah kejuruan (SMK). Nama ini berlaku hingga saat ini.

Pertumbuhan pendidikan kejuruan mulai tersendat sejak dimulainya otonomi daerah tahun 2001 karena makin sulitnya mendapatkan dana

**1975**

*Pemerintah Indonesia dibantu Swiss mendirikan Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung pada 1975, yang menjadi politeknik pertama Tanah Air.*

**1997**

*Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK.*

**2019**

*27 Desember 2019 berdirinya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)*

**1967**

*Pemerintah Indonesia mengembangkan sekolah teknik di bawah naungan Ditjen Pendidikan Dasar.*

## FROM THE DUTCH COLONIZERS (KOMPENI) TO JOKOWI

# 1853

*The Netherlands established the vocational school Ambachts school van Soerabaia (Surabaya Craft School). A similar school was established in Jakarta in 1856.*

# 1743

*The Netherlands established the Maritime Academy (Academie der Marine) as a vocational-oriented school in 1743. However, the academy was closed in 1755.*

# 1860

*The Dutch East Indies government opened the Craft School in Surabaya for the European community. From craft education, vocational education further developed into agricultural and technical vocational fields, which cultivated skills such as construction expertise, mining expertise, engineering education, and others.*



# 1940

*There were approximately 88 vocational schools in Indonesia with 13,230 students, mostly in the fields of crafts, engineering, and agriculture.*

# 1942

*Japan established the Surabaya Japanese Language High School, Surabaya Technical High School, and Sawahan Japanese Language School in Surabaya.*

*Vocational education is not a new concept in Indonesia. Its history stretches back to the colonial era.*

*Tracing its roots, the Dutch East India Company (VOC) had already established vocational education as a means to prepare graduates for work in their respective fields. The education provided focused on practical competency training.*

*Before the establishment of religious schools such as seminaries, the Dutch first founded the*

*Academie der Marine, a maritime academy, in 1743.*

*However, the school was closed in 1755.*

*In 1853, the Dutch established the Ambachtsschool van Soerabaia, a vocational school in Surabaya. This school was intended for Indo and Dutch children. A similar school was established in Jakarta in 1856.*

*A few years later, the Dutch East Indies government reopened the Surabaya Vocational School for Europeans in 1860.*



# 1975

*The Indonesian government, with the assistance of Switzerland, established the Swiss-German Institute of Technology Bandung (Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung) in 1975, which became the first polytechnic in the country.*

# 1967

*The Indonesian government developed technical schools under the auspices of the Directorate General of Primary Education.*

# 1997

*The change of nomenclature from SMKTA to SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) took place.*

# 2019

*On December 27, 2019, the Directorate General of Vocational Education was established under the Ministry of Education and Culture.*

*From craftsmanship, vocational education further developed in the fields of agriculture and engineering, expanding skills in areas such as construction, mining, engineering, and more. Schools for women were also established. Initially intended only for Europeans and Chinese, vocational education was eventually extended to the native population.*

*By the end of the Dutch colonial era in 1940, there were approximately 88 vocational schools in*

*Indonesia with 13,230 students, primarily focused on fields such as craftsmanship, engineering, and agriculture.*

*After the era of independence, vocational education continued to evolve alongside the growth of schools in the country. In upper secondary education, vocational education was known according to the specific vocational competency, such as STM (Technical Middle School), SMEA (Upper Economic Middle School), and SMKK (Family Welfare Middle School).*

*Through the “link and match” policy initiated by the Minister of Education and Culture, Wardiman Djojonegoro, vocational school management was implemented through a dual system education with an emphasis on apprenticeships supported by adequate facilities and infrastructure. This was in line with the institutional goals of vocational schools according to Law No. 2/1989 on the National Education System, which prioritizes preparing students for the workforce and developing a professional attitude.*

*In 1997, Minister Wardiman issued a decree changing the nomenclature of SMKTA (Vocational High School for Labor) to SMK (Vocational High School). Since then, all types of upper secondary vocational schools have been referred to as Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), a name that still stands today.*

*The growth of vocational education faced challenges following the implementation of regional autonomy in 2001, as it became increasingly difficult to secure funding for new school construction, rehabilitation, and the procurement of new equipment.*



## **KEINGINAN MEMAJUKAN PENDIDIKAN VOKASI DICETUSKAN OLEH PRESIDEN RI JOKO WIDODO (JOKOWI), SEIRING PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH UNTUK MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).**

untuk pembangunan sekolah baru maupun rehabilitasi, serta pengadaan peralatan baru.

Sementara itu, sejarah awal mula pendidikan tinggi vokasi (PTV) di Indonesia dimulai kala pemerintah Swiss membantu pendirian Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung pada 1975, yang menjadi politeknik pertama Tanah Air. Program politeknik yang mengadopsi program *Technikerschule* di Swiss ini kemudian diselenggarakan juga oleh perguruan tinggi non politeknik dengan nama sekolah vokasi, seperti di UGM dan UI, ataupun fakultas vokasi seperti di ITS.

Hingga akhirnya, keinginan dan komitmen memajukan pendidikan vokasi dicetuskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), seiring program prioritas pemerintah untuk menggenjot pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta (16/5/2019), Jokowi menegaskan bahwa pembangunan SDM sangat penting, terlebih Indonesia akan memasuki bonus demografi pada 2030. Bonus demografi merupakan keadaan pada saat jumlah penduduk usia produktif (15-64

*Meanwhile, the early history of higher vocational education (VHE) in Indonesia began with the Swiss government's assistance in establishing the Swiss Mechanical Polytechnic-Institute of Technology Bandung in 1975, the first polytechnic in the country. The polytechnic program, inspired by the *Technikerschule* program in Switzerland, was also adopted by non-polytechnic higher education institutions under vocational schools, such as UGM and UI, or through vocational faculties like in ITS.*

*Eventually, President Joko Widodo (Jokowi) expressed his desire to advance vocational education in line with the government's priority programs to enhance human resources development. During a Limited Cabinet Meeting at the Merdeka Palace in Jakarta on May 16, 2019, Jokowi emphasized the importance of human resource development, especially as Indonesia is set to enter its demographic bonus phase in 2030. The demographic bonus refers to a situation where the productive population (aged 15-64) is greater than the non-productive population (under 15 and above 65). Jokowi hoped that*

***PRESIDENT JOKO WIDODO (JOKOWI) EXPRESSED HIS DESIRE TO ADVANCE VOCATIONAL EDUCATION IN LINE WITH THE GOVERNMENT'S PRIORITY PROGRAMS TO ENHANCE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT.***

tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk nonproduktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Jokowi pun berharap, pendidikan vokasi bisa melahirkan SDM yang berkualitas dan siap bersaing.

### **BERDIRINYA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Keseriusan pemerintah memajukan pendidikan vokasi tanah air akhirnya diwujudkan dengan berdirinya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 27 Desember 2019. Hal tersebut seiring dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan perubahan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Kemendikbud.

Mengingat pentingnya peran pendidikan vokasi untuk menyambut visi Indonesia Maju 2045, pemerintah kembali menunjukkan keseriusan dalam menguatkan pendidikan vokasi di tanah air dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kehadiran aturan baru ini semakin mengakselerasi transformasi pendidikan vokasi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terdiri atas 5 unit eselon 2, yakni Sekretariat Direktorat Jenderal Pen-

*vocational education could produce high-quality and competitive human resources.*

### **ESTABLISHMENT OF THE DIRECTORATE GENERAL OF VOCATIONAL EDUCATION**

*With the seriousness of the government to advance vocational education in the country, the Directorate General of Vocational Education (DGVE) was established within the Ministry of Education and Culture (MoE) on December 27, 2019. This was in line with Presidential Regulation No. 82 of 2019 on the Ministry of Education and Culture, which introduced the Directorate General of Vocational Education to the MoE.*

*Recognizing the importance of vocational education in realizing the vision of “Indonesia Maju 2045” (Advanced Indonesia 2045), the government further demonstrated its commitment to strengthening vocational education by issuing Presidential Regulation No. 68 of 2022 on the Revitalization of Vocational Education and Vocational Training. This new regulation has accelerated the transformation of vocational education in Indonesia.*

*Based on the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 9 of 2020 on Amendments to Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 45 of 2020 on the Organization and Working Procedures of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, the Directorate General of Vocational Education consists of five second-level units: the Secretariat of the Directorate General of Vocational Education, the Directorate of Vocational Secondary Schools, the Directorate of Vocational Higher*



**“REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI MERUPAKAN UPAYA PEMBENAHAN PENDIDIKAN VOKASI YANG DILAKUKAN SECARA MENYELURUH, BERKESINAMBUNGAN, TERINTEGRASI, DAN TERKOORDINASI.”**



***“THE REVITALIZATION OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING IS AN EFFORT TO COMPREHENSIVELY, CONTINUOUSLY, INTEGRATIVELY, AND COLLABORATIVELY IMPROVE VOCATIONAL EDUCATION.”***



Cessna



SKYHAWK  
SP



POLIBATA

didikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Kursus dan Pelatihan, serta Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Seiring dengan dinamika kebutuhan organisasi, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi kemudian dibagi menjadi dua direktorat, yaitu Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi serta Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terdiri atas 6 unit eselon 2, yakni Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi.

*Education and Professions, the Directorate of Courses and Training, and the Directorate of Partnership and Coordination with the Business and Industrial World.*

*In response to organizational needs, according to the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2021 on the Organization and Working Procedures of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, the Directorate of Vocational Higher Education and Professions was divided into two directorates: the Academic Directorate of Vocational Higher Education and the Directorate of Institutional and Resources for Vocational Higher Education.*

*Currently, the Directorate General of Vocational Education consists of six second-level units: the Secretariat of the Directorate General of Vocational Education, the Directorate of Vocational Secondary Schools, the Academic Directorate of Vocational Higher Education, the Directorate of Courses and Training, the Directorate of Partnership and Alignment of Vocational Education with Business and Industry, and the Directorate of Institutional and Resources for Vocational Higher Education.*





**STRUKTUR  
ORGANISASI**

*ORGANIZATIONAL  
STRUCTURE*



## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# STRUKTUR ORGANISASI



**Kiki Yuliati**  
Direktur Jenderal  
Pendidikan Vokasi

*Director General of  
Vocational Education*



**Muhamad  
Fajar Subkhan**

Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber  
Daya Pendidikan Tinggi Vokasi

*Acting Director of Institutions and  
Resources of Vocational Higher  
Education*



**Beny  
Bandanadjaja**

Direktur Akademik  
Pendidikan Tinggi Vokasi

*Academic Director of Vocational  
Higher Education*

**Politeknik dan Akademi  
Komunitas Negeri (49 unit kerja)**

# ORGANIZATIONAL STRUCTURE



**Saryadi**  
Sekretaris Direktorat  
Jenderal Pendidikan Vokasi  
*Secretary for the Directorate  
General of Vocational Education*



**Wardani  
Sugiyanto**  
Direktur Sekolah  
Menengah Kejuruan  
*Director of Vocational High School*



**Wartanto**  
Direktur Kursus dan Pelatihan  
*Director of Courses and Training*



**Uuf Brajawidagda**  
Plt. Direktur Kemitraan dan  
Penyelarasan DUDI  
*Acting Director of Partnership  
and Alignment of Vocational  
Education with Business and  
Industry*

**BBPMPV/BPPMPV (7 unit kerja)**

## SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Pendidikan Vokasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang koordinasi dan pelayanan administratif. Unit ini dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

### TUGAS

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

### FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelaras-an dunia usaha dan dunia industri;
- pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelaras-an dunia usaha dan dunia industri;
- koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan

pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelaras-an dunia usaha dan dunia industri;

- koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelaras-an dunia usaha dan dunia industri;
- pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelaras-an dunia usaha dan dunia industri; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Sebagai bentuk pelayanan hubungan masyarakat dan publikasi, Setditjen Pendidikan Vokasi menyediakan ragam sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait kegiatan maupun program Ditjen Pendidikan Vokasi, yakni berupa pengumuman dan berita pada laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id), majalah digital Vokasi, serta media sosial.



**“PENDIDIKAN VOKASI BISA MEMBANGUN SDM  
INDONESIA YANG BERDAYA SAING GLOBAL.”**



***“VOCATIONAL EDUCATION CAN BUILD GLOBALLY  
COMPETITIVE HUMAN RESOURCES FOR INDONESIA.”***



## **SECRETARIAT FOR THE DIRECTORATE GENERAL OF VOCATIONAL EDUCATION**

*The Secretariat for the Directorate General of Vocational Education is an organizational unit within the Directorate General of Vocational Education responsible for coordination and administrative services. This unit is led by a secretary, who is subordinate to and responsible to the Director General of Vocational Education.*

### **DUTIES**

*The Secretariat for the Directorate General of Vocational Education has the task to implement administrative affairs and coordinate the implementation of organizational units' tasks within the Directorate General.*

### **FUNCTIONS**

*In carrying out its duties, the Secretariat for the Directorate General of Vocational Education performs the following functions:*

- coordinate the formulation of policies, plans, programs, activities, and budgets in the fields of vocational higher education, vocational secondary education, skills development and training, and partnership and alignment of vocational education with business and industry;*
- collect and analysis of data and information in the fields of vocational higher education, vocational secondary education, skills development and training, and partnership and alignment of vocational education with business and industry;*
- coordinate and implement cooperation in the fields of vocational higher education, vocational secondary education, skills development and*

- training, and partnership and alignment of vocational education with business and industry;*
- coordinate the management and financial reporting of the Directorate General;*
- prepare materials and legislation and facilitate legal advocacy within the Directorate General;*
- handle organizational and administrative matters within the Directorate General;*
- manage personnel affairs within the Directorate General;*
- coordinate the preparation of publications and public relations materials in the fields of vocational higher education, vocational secondary education, skills development and training, and partnership and alignment of vocational education with business and industry;*
- manage state-owned assets within the Directorate General;*
- coordinate the monitoring and evaluation of policies, plans, programs, activities, targets, and budgets in the fields of vocational higher education, vocational secondary education, skills development and training, and partnership and alignment of vocational education with business and industry; and*
- handle administrative matters within the Directorate General.*

*As part of its public relations and publication services, the Secretariat for the Directorate General of Vocational Education provides various information resources accessible to the public regarding the activities and programs of the Directorate General of Vocational Education. These resources include announcements and news on the website [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id), the digital magazine "Vokasi," and social media platforms.*

## DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang SMK, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Direktorat SMK dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Pendidikan Vokasi.

### TUGAS

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan.

### FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan;
- pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang

peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;

- pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan;
- penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan sekolah menengah kejuruan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah menengah kejuruan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.



**“PENDIDIKAN  
VOKASIONAL YANG  
BERKUALITAS  
MENJADI STRATEGI  
DAN PELUANG  
BAGI INDONESIA  
UNTUK MENGATASI  
TANTANGAN  
ANGKATAN KERJA  
DI INDONESIA YANG  
MASIH LEMAH.”**

***“QUALITY  
VOCATIONAL  
EDUCATION SERVES  
AS A STRATEGY  
AND OPPORTUNITY  
FOR INDONESIA  
TO ADDRESS THE  
CHALLENGES  
OF ITS WEAK  
WORKFORCE.”***



## **DIRECTORATE OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL**

*The Directorate of Vocational High School is an organizational unit within the Directorate General of Vocational Education in the field of vocational high schools, skills education, and workforce training.*

*The Directorate of Vocational High School is headed by a director who is subordinate to and responsible to the Director General of Vocational Education.*

### **DUTIES**

*The Directorate of Vocational High School has the task to formulate and implement policies in the areas of vocational high schools and special education in vocational high schools.*

### **FUNCTIONS**

*In carrying out its duties, the Directorate of Vocational High School performs the following functions:*

- prepare the formulation of policies in the areas of students, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational high schools and special education in vocational high schools;*
- prepare norms, procedures, and criteria in the areas of students, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational high schools and special education in vocational high schools;*
- prepare norms, procedures, and criteria in the areas of competency development for teachers, educators, and education personnel at vocational high schools;*
- implement quality assurance policies in the areas of students, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational high schools and special education in vocational high schools;*
- implement policies in the areas of students, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational high schools and special education in vocational high schools;*
- facilitate the implementation of activities in the areas of students, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational high schools and special education in vocational high schools;*
- facilitate in the areas of competency development for teachers, educators, and education personnel at vocational high schools;*
- provide technical guidance and supervision in the areas of students, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational high schools and special education in vocational high schools;*
- provide technical guidance and supervision in the areas of competency development for teachers, educators, and education personnel at vocational high schools;*
- prepare legal permits for foreign representative offices or foreign institutions conducting vocational education;*
- monitor, evaluate, and report in areas of vocational high schools; and*
- handle administrative affairs within the Directorate.*

# SMK DALAM ANGKA

## Data Bidang Keahlian SMK di Indonesia

Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknologi Manufaktur dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi dan Informasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Agribisnis dan Agroteknologi, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, serta Seni dan Ekonomi Kreatif.

Bidang keahlian tersebut berdasarkan bidang keahlian yang menjadi bidang prioritas nasional.

Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

### Jumlah SMK

**14.385**  sekolah

3.684 SMK negeri  
10.701 SMK swasta

### Jumlah Siswa SMK

**5.115.545**  orang

2.380.074 orang SMK negeri  
2.735.471 orang SMK swasta

### Jumlah Guru SMK

**483.932**  orang

208.245 guru SMK negeri  
275.687 guru SMK swasta

### Pulau Sumatra: 20,84% Jumlah: 2.843

Teknik komputer dan informatika: 10,41%  
Teknik komputer dan jaringan: 8,80%  
Teknik otomotif: 8,34%  
Akuntansi dan keuangan lembaga: 7,01%  
Teknik kendaraan ringan dan otomotif: 6,64%



### Pulau Jawa: 56,92% Jumlah: 7.765

Teknik komputer dan informatika: 12,01%  
Teknik otomotif: 9,06%  
Teknik komputer dan jaringan: 8,52%  
Akuntansi dan keuangan lembaga: 6,86%  
Teknik kendaraan ringan dan otomotif: 6,45%



**Pulau Kalimantan: 5,18%**  
**Jumlah: 707**

Teknik komputer dan informatika: 9,56%  
Teknik komputer dan jaringan: 7,01 %  
Akuntansi dan keuangan lembaga: 6,27%  
Teknik otomotif: 6,09%  
Agribisnis tanaman: 5,53%

**Pulau Sulawesi: 8,36%**  
**Jumlah: 1.141**

Teknik komputer dan informatika: 10,37%  
Teknik komputer dan jaringan: 9,87%  
Teknik otomotif: 5,86%  
Teknik kendaraan ringan dan otomotif: 4,79%  
Otomasi dan tata kelola perkantoran: 4,75%

**Pulau Maluku: 1,71%**  
**Jumlah: 233**

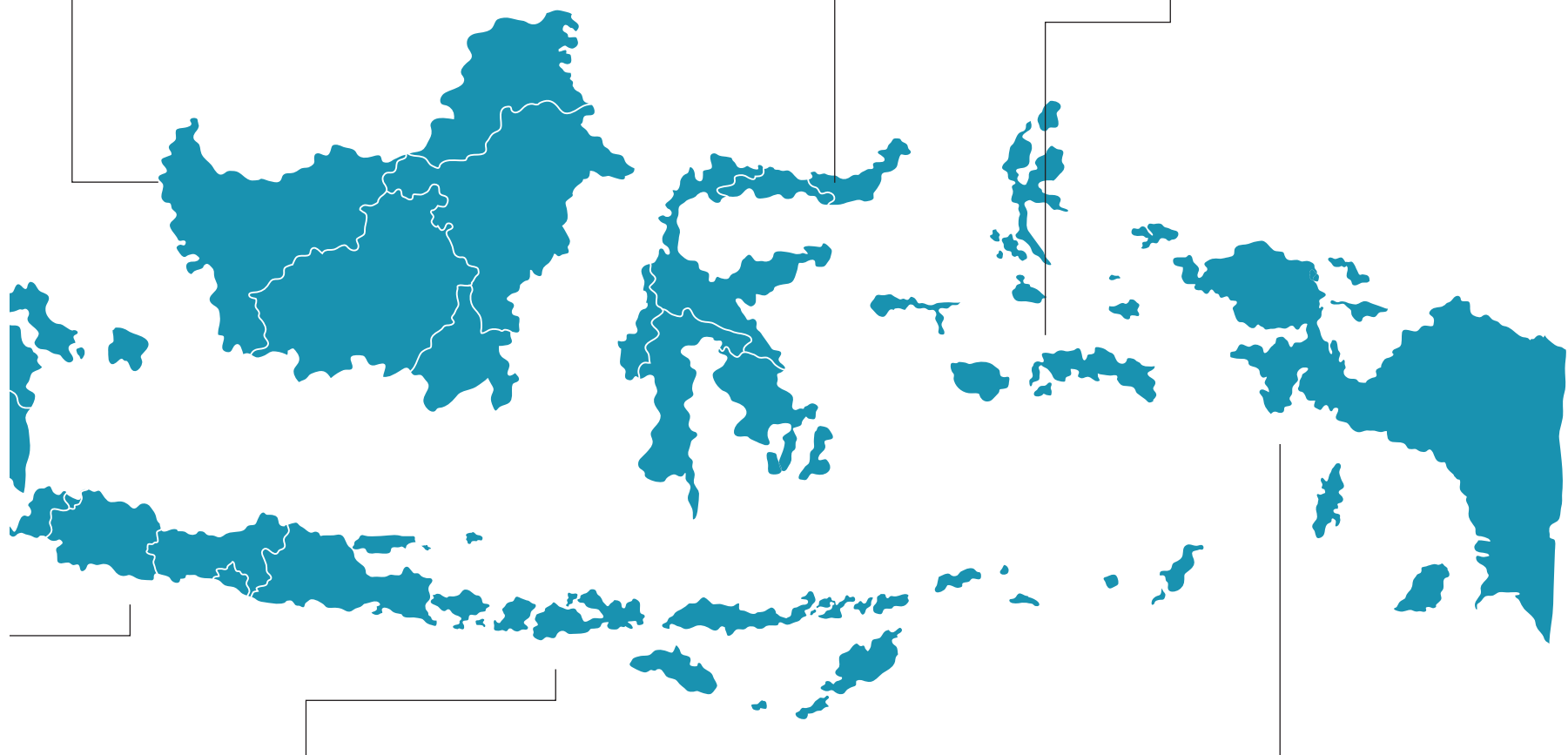
Teknik komputer dan informatika: 7,51%  
Teknik komputer dan jaringan: 6,53%  
Asisten keperawatan: 6,26%  
Agribisnis pengolahan hasil perikanan: 4,92%  
Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura: 4,86%

**Pulau Bali dan Nusa Tenggara: 5,63%**  
**Jumlah: 768**

Teknik komputer dan informatika: 7,65%  
Teknik komputer dan jaringan: 6,8%  
Teknik otomotif; 6,85%  
Teknik Kendaraan ringan dan otomotif: 4,99%  
Otomasi dan tata kelola perkantoran: 4,09%

**Pulau Papua: 1,36%**  
**Jumlah: 185**

Teknik komputer dan informatika: 8,35%  
Teknik komputer dan jaringan: 7,24%  
Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura: 4,43%  
Agribisnis tanaman: 4,43%  
Otomasi dan tata kelola perkantoran: 4,43%



# SMK IN NUMBER

## Data on Fields of Expertise in SMKs in Indonesia:

Construction and Property Technology, Manufacturing and Engineering Technology, Energy and Mining, Technology and Information, Health and Social Work, Agribusiness and Agrotechnology, Maritime, Business and Management, Tourism, Arts and Creative Economy

These fields of expertise are based on the priority areas determined at the national level.

Source: Minister of Education, Culture, Research, and Technology Decree No. 56/M/2022 on the Guidelines for Curriculum Implementation in the Context of Learning Recovery.

## The Total Number of SMKs

**14,385**  schools

3,684 being public SMKS  
10,701 being private SMKS

## The total number of SMK students

**5.115.545**  students

2,380,074 students in public SMKS  
2,735,471 students in private SMKS

## Jumlah Guru SMK

**483.932**  teachers

208,245 teachers in public SMKS  
275,687 teachers in private SMKS

**Sumatra Island: 20.84%**  
**Total: 2,843**

Computer Science and Informatics: 10.41%  
Computer and Network Engineering: 8.80%  
Automotive Engineering: 8.34%  
Accounting and Financial Institutions: 7.01%  
Light Vehicle Technology and Automotive: 6.64%

**Java Island: 56.92%**  
**Total: 7,765**

Computer Science and Informatics: 12.01%  
Automotive Engineering: 9.06%  
Computer and Network Engineering: 8.52%  
Accounting and Financial Institutions: 6.86%  
Light Vehicle Technology and Automotive: 6.45%

**Kalimantan Island: 5.18%**  
**Total: 707**

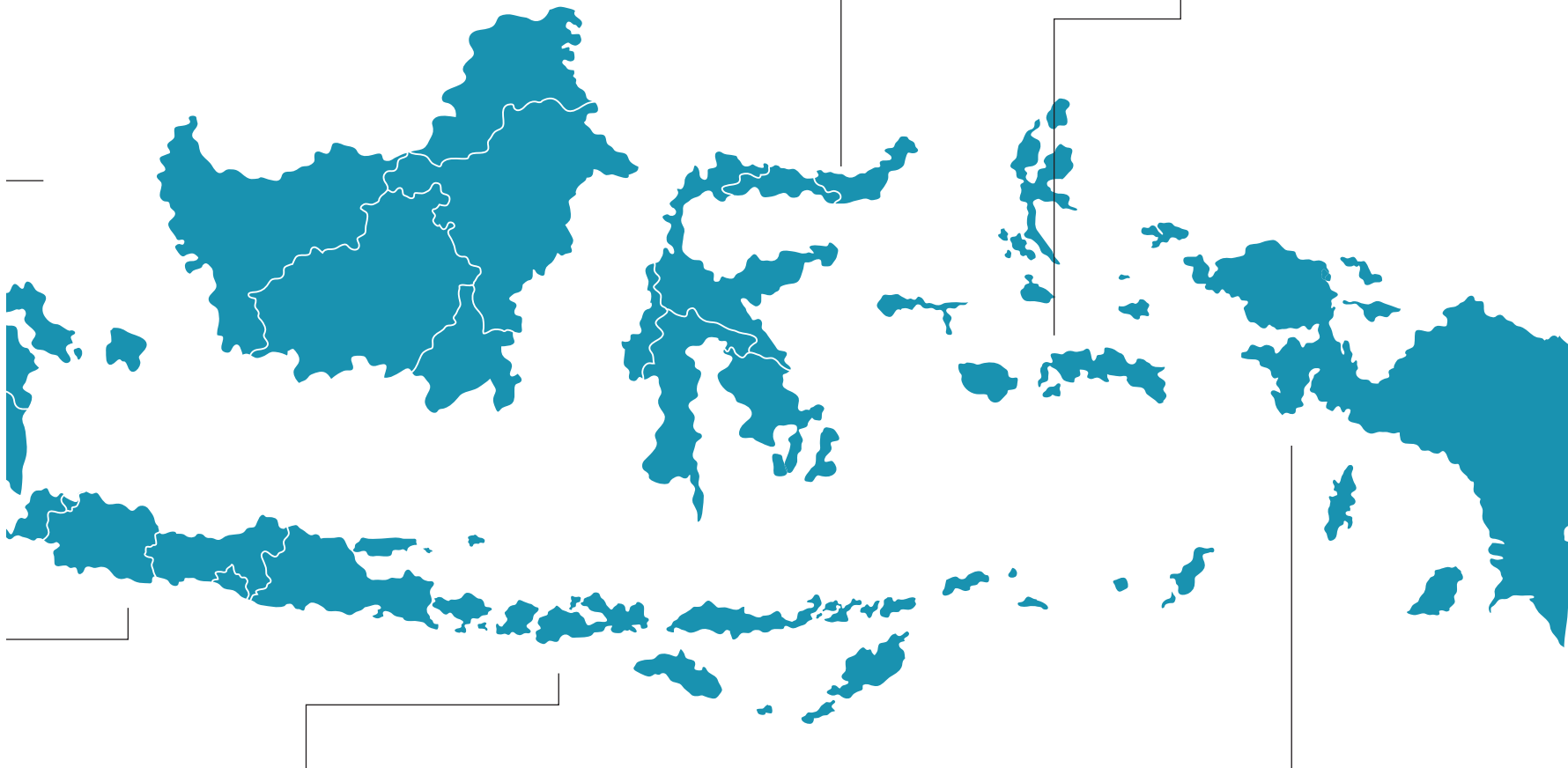
Computer Science and Informatics: 9.56%  
Computer and Network Engineering: 7.01%  
Accounting and Financial Institutions: 6.27%  
Automotive Engineering: 6.09%  
Plantation Agribusiness: 5.53%

**Sulawesi Island: 8.36%**  
**Total: 1,141**

Computer Science and Informatics: 10.37%  
Computer and Network Engineering: 9.87%  
Automotive Engineering: 5.86%  
Light Vehicle Technology and Automotive: 4.79%  
Automation and Office Administration: 4.75%

**Maluku Island: 1.71%**  
**Total: 233**

Computer Science and Informatics: 7.51%  
Computer and Network Engineering: 6.53%  
Nursing Assistant: 6.26%  
Fishery Product Processing Agribusiness: 4.92%  
Food Crop and Horticulture Agribusiness: 4.86%




**Bali and Nusa Tenggara Islands: 5.63%**  
**Total: 768**

Computer Science and Informatics: 7.65%  
Computer and Network Engineering: 6.8%  
Automotive Engineering: 6.85%  
Light Vehicle Technology and Automotive: 4.99%  
Automation and Office Administration: 4.09%

**Papua Island: 1.36%**  
**Total: 185**

Computer Science and Informatics: 8.35%  
Computer and Network Engineering: 7.24%  
Food Crop and Horticulture Agribusiness: 4.43%  
Plantation Agribusiness: 4.43%  
Automation and Office Administration: 4.43%



**“PENDIDIKAN  
VOKASI HARUS  
BERDAMPINGAN  
DENGAN INDUSTRI.  
KARENA ITU,  
LKP DAN PARA  
INSTRUKTUR  
HARUS  
MEMIKIRKAN  
KEBUTUHAN  
DUDI.”**

***“VOCATIONAL EDUCATION SHOULD GO HAND IN HAND  
WITH THE INDUSTRY. THEREFORE, COURSES AND TRAINING  
INSTITUTIONS AS WELL AS THEIR INSTRUCTORS SHOULD  
CONSIDER THE NEEDS OF THE PRIVATE SECTOR.”***

## DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN

Direktorat Kursus dan Pelatihan merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Direktorat Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

## TUGAS POKOK

Direktorat Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

## FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kompetensi vokasional pendidik vokasi lainnya dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bi-

dang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

- pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional pendidik vokasi lainnya dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional pendidik vokasi lainnya dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

## PROFIL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI INDONESIA

### Jumlah Lembaga Kursus Tervalidasi

**10.652** lembaga

### Jumlah Peserta Didik Kursus

**2.940.249** orang

### Jumlah Rumpun Jurusan Kursus

**15** rumpun

### Macam Rumpun Pendidikan Kursus

1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Digital
3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
4. Agribisnis dan Agroteknologi
5. Kemaritiman
6. Manajemen
7. Pariwisata
8. Seni, Budaya, dan Sosial
9. Bahasa
10. Keolahragaan
11. Komunikasi dan Kepribadian
12. Industri dan Kerajinan
13. Transportasi
14. Keuangan dan Aktuaria
15. Jasa Pelayanan Pendukung

Sumber data: Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2022

### DIRECTORATE OF COURSES AND TRAINING

*The Directorate of Courses and Training is an organizational unit within the Directorate General of Vocational Education that focuses on skill education and job training. The Directorate of Courses and Training is led by a director who reports to and is responsible to the Director General of Vocational Education.*

### DUTIES

*The Directorate of Courses and Training has the task to formulate and implement policies in the areas of vocational education and occupational training.*

### FUNCTIONS

*In carrying out its duties, the Directorate of Courses and Training performs the following functions:*

- *prepare the formulation of policies in the areas of learners, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational education and occupational training;*
- *prepare norms, procedures, and criteria in the areas of learners, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational education and occupational training;*
- *prepare norms, procedures, and criteria in the areas of competency development for teachers, educators, and education personnel at vocational education and occupational training;*
- *implement quality assurance policies in the areas of learners, learning, infrastructure,*

- governance, and assessment in vocational education and occupational training;
- implement policies in the areas of learners, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational education and occupational training;
- facilitate the implementation of activities in the areas of learners, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational education and occupational training;
- facilitate in the areas of competency development for teachers, educators, and education personnel at vocational education and occupational training;
- provide technical guidance and supervision in the areas of learners, learning, infrastructure, governance, and assessment in vocational education and occupational training;
- provide technical guidance and supervision in the areas of competency development for teachers, educators, and education personnel at vocational education and occupational training;
- prepare legal permits for foreign representative offices or foreign institutions conducting vocational education and occupational training;
- monitor, evaluate, and report in areas of vocational education and occupational training; and
- handle administrative affairs within the Directorate.

## PROFILE OF COURSES AND TRAINING INSTITUTIONS (LKP) IN INDONESIA

The total number of validated courses and training institutions in Indonesia is

**10,652**

Nationally, there are

**2,940,249**

learners in self-funded and government-assisted training programs

The total number of branches of course-based education

**15** branches

The various branches of course-based education are as follows:

1. Technology and Engineering
2. Information Technology and Digital
3. Health and Social Work
4. Agribusiness and Agrotechnology
5. Maritime
6. Management
7. Tourism
8. Arts, Culture, and Social
9. Language
10. Sports
11. Communication and Personality
12. Industry and Crafts
13. Transportation
14. Finance and Actuarial
15. Support Services

Data source: Basic Education Data (Dapodik), 2022



Profesional  
Ma-e-l  
Artis  
PUSPITA MARTI





CATHIE STUFF  
BI-COLOUR 2.0

EOS DIGITAL



## **“KARAKTERISTIK PENDIDIKAN VOKASI TERSTRUKTUR NAMUN FLEKSIBEL, KEKINIAN, TERJANGKAU, SERTA MEMILIKI AKSESIBILITAS YANG LEBIH MUDAH.”**

### **DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (APTIV) merupakan unit organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi yang membidangi bidang PTV. Direktorat APTIV dipimpin oleh direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

### **TUGAS**

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berasal dari pendidikan vokasi.

### **FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang

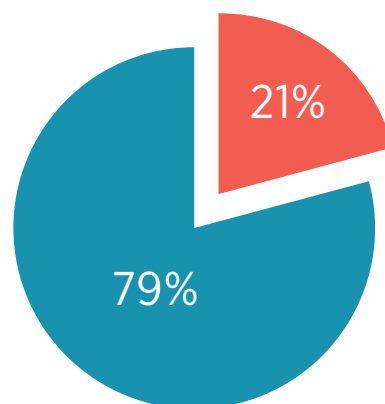
- pembelajaran dan kemahasiswaan pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- fasilitasi di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, dan teknologi pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akademik pendidikan tinggi vokasi; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

***“THE CHARACTERISTICS OF VOCATIONAL EDUCATION ARE STRUCTURED, YET FLEXIBLE, CURRENT, AFFORDABLE, AND EASILY ACCESSIBLE.”***

## DATA PERGURUAN TINGGI VOKASI DAN AKADEMI KOMUNITAS

### Jumlah Politeknik

**235** Politeknik



44 politeknik negeri

191 politeknik swasta

**13**

Lembaga politeknik negeri yang telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU)

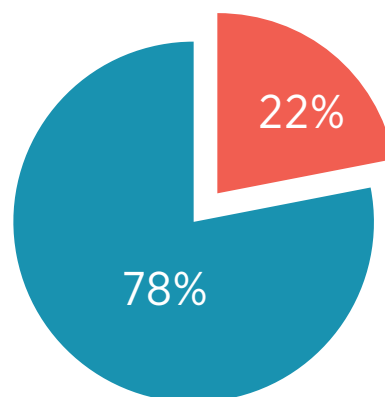
### Jumlah Mahasiswa Politeknik

**207.755** orang

121.724 orang politeknik negeri  
86.031 orang politeknik swasta

### Jumlah Akademi Komunitas

**37** Akademi Komunitas



5 lembaga negeri

32 lembaga swasta

### Jumlah Mahasiswa Akademi Komunitas

**11.051** orang

1.445 orang akademi komunitas negeri  
9.606 orang akademi komunitas swasta

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan vokasi

(UNISTA) terdapat **2.152** dengan jumlah mahasiswanya sebanyak **663.460** orang



## **THE ACADEMIC DIRECTORATE OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION**

*The Academic Directorate of Vocational Higher Education (APTV) is an organizational unit within the Directorate General of Vocational Education that oversees the field of vocational higher education. The APTV is led by a director who reports to and is responsible to the Director General of Vocational Education.*

### **DUTIES**

*The Academic Directorate of Vocational Higher Education has the task to formulate and implement policies in the areas of learning, student affairs, research, technology, and community engagement in vocational and professional higher education fields.*

### **FUNCTIONS**

*In carrying out its duties, the Academic Directorate of Vocational Higher Education performs the following functions:*

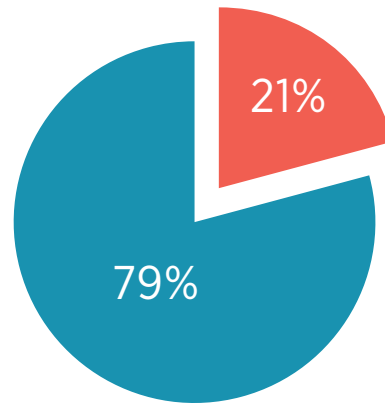
- *prepare the formulation of policies in the areas of learning and student affairs in vocational*

- and professional higher education;*
- *prepare coordination materials and synchronize policy implementation in the areas of research and technology in vocational and professional higher education;*
- *implement policies in the areas of learning, student affairs, research, technology, and community engagement in vocational and professional higher education;*
- *implement quality assurance in the areas of learning, student affairs, research, technology, and community engagement in vocational and professional higher education;*
- *facilitate in the areas of learning, student affairs, research, technology, and community engagement in vocational and professional higher education;*
- *provide technical guidance and supervision in the areas of learning, student affairs, research, technology, and community engagement in vocational and professional higher education;*
- *monitor, evaluate, and report in the field of academic affairs in vocational higher education; and*
- *handle administrative affairs within the Directorate.*

## DATA ON VOCATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND COMMUNITY COLLEGES

The total number of polytechnics

**235** polytechnics



44 being public

191 being private

**13**

There are 5 polytechnics that have been designated as Public Service Agencies (Badan Layanan Umum or BLU).

The total number of polytechnic students

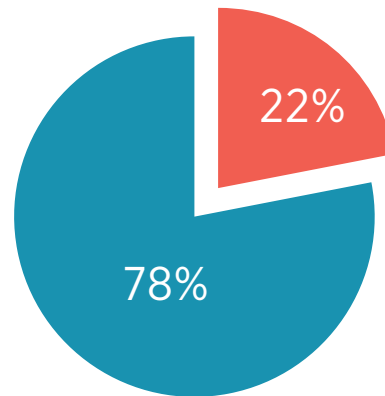
**207,755** students

121,724 students enrolled in public polytechnics

86,031 students enrolled in private polytechnics

Total Community Colleges

**37** Community Colleges



5 being public

32 being private

The total number of Community College students

**11,051** students

1,445 students in public Community Colleges

9,606 students in private Community Colleges

There are **2,152** Vocational Universities (UNISTA) with a total student population of

**663,460**

***“THE EDUCATION SYSTEM NEEDS TO BE ADJUSTED TO BRIDGE THE GAP BETWEEN THEORY AND PRACTICE SO THAT VOCATIONAL EDUCATION AT HIGHER INSTITUTIONS BECOMES MORE RELEVANT TO THE CHANGING SOCIAL-CULTURAL ENVIRONMENT AND THE DEMANDS OF THE WORKFORCE, PRODUCING GRADUATES READY FOR THE WORKFORCE.”***





## **DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

Transformasi pendidikan vokasi bertujuan untuk semakin memperluas akses pendidikan vokasi bagi seluruh pihak, termasuk peserta didik, satuan pendidikan, guru/dosen/instruktur/pendidik, dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter dapat diwujudkan.

Seiring dengan kebutuhan di atas, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi kemudian dibagi menjadi dua Direktorat, yaitu Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi serta Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (KLSD PTV).

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi merupakan unit or-

ganisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang membidangi bidang kelembagaan dan sumber daya pendidikan vokasi. Direktorat KLSD PTV dipimpin oleh direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

### **TUGAS**

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berasal dari pendidikan vokasi.

### **FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang

**“SISTEM PENDIDIKAN PERLU DISESUAIKAN GUNA  
MENGHUBUNGAN TEORI DAN PRAKTIK SUPAYA  
PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI VOKASI LEBIH RELEVAN  
DENGAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA SERTA KEBUTUHAN  
DUNIA KERJA, DAN LULUSAN YANG DIHASILKAN MENJADI  
INTELEKTUAL YANG SIAP BERKARYA.”**

kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;

- pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- fasilitasi di bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sumber daya pendidikan tinggi vokasi; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

## **THE DIRECTORATE OF INSTITUTIONS AND RESOURCES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION**

*The transformation of vocational education aims to expand access to vocational education for all stakeholders, including learners, educational institutions, teachers/instructors/educators, and educational personnel. Consequently, skilled and character-oriented human resources can be realized.*

*In line with the above needs, according to the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 28 of 2021 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, the Directorate of Vocational and Professional Higher Education is divided into two directorates: the Academic Directorate of Vocational Higher Education and the Directorate of Institutional and Human Resources of Vocational Higher Education.*

*The Directorate of Institutional and Human Resources of Vocational Higher Education is an organizational unit within the Directorate General of Vocational Education that focuses on institutional and human resources aspects of vocational education. The Directorate is led by a director who reports to and is responsible to the Director General of Vocational Education.*

## **DUTIES**

*The Directorate of Institutions and Resources of Vocational Higher Education has the task to*

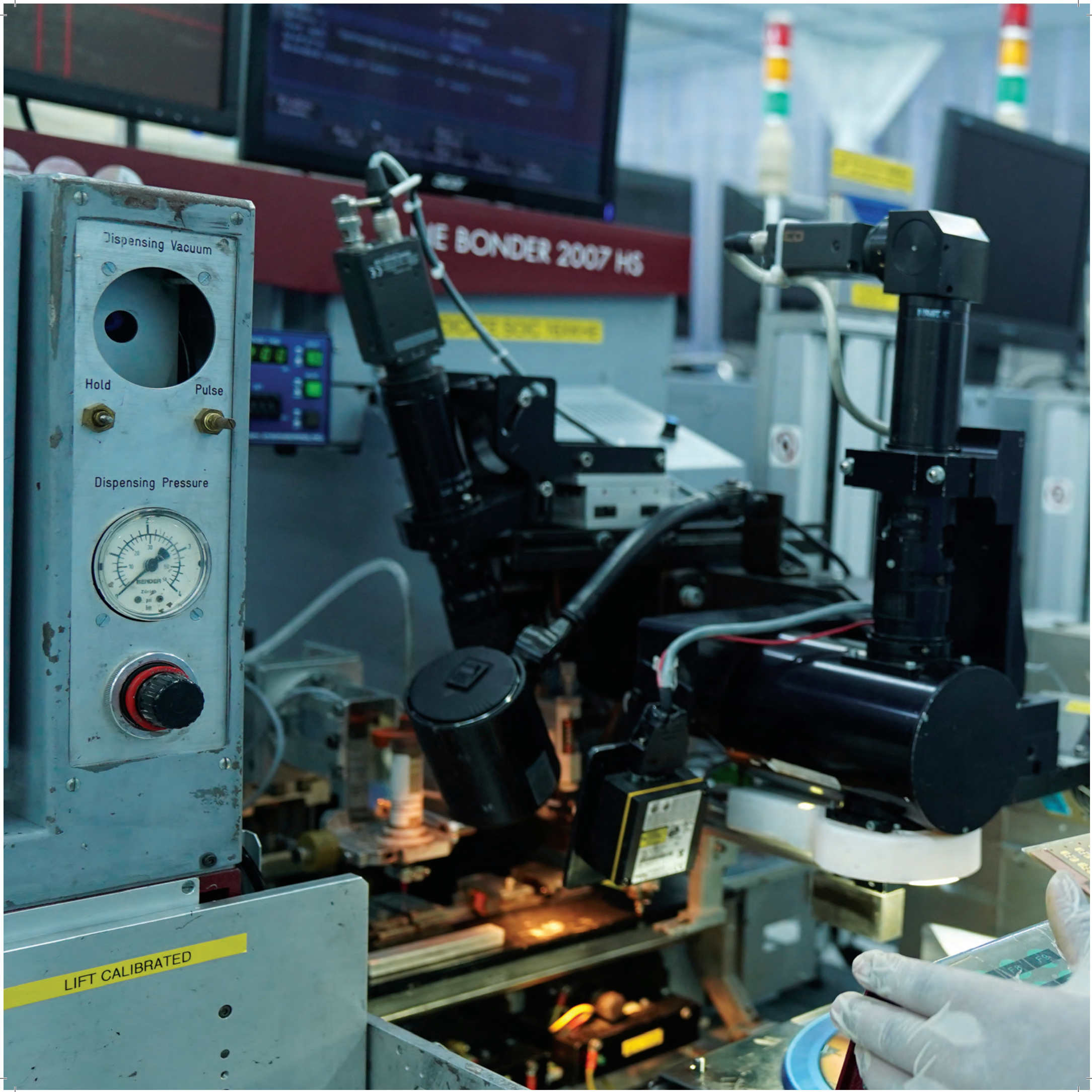


*formulate and implement policies in the areas of institutions and resources in vocational and professional higher education fields.*

### **FUNCTIONS**

*In carrying out its duties, the Directorate of Institutions and Resources of Vocational Higher Education performs the following functions:*

- *prepare the formulation of policies in the field of institutions and resources of vocational and professional higher education;*
- *implement policies in the field of institutions and resources of vocational and professional higher education;*
- *implement quality assurance in the field of institutions and resources of vocational and professional higher education;*
- *implement policies in the development of vocational competency for vocational lecturers, other vocational educators, and vocational educational personnel in vocational and professional higher education;*
- *facilitate in the field of institutions and resources of vocational and professional higher education;*
- *facilitate in the development of vocational competency for vocational lecturers, other vocational educators, and vocational educational personnel in vocational and professional higher education;*
- *provide technical guidance and supervision in the field of institutions and resources of vocational and professional higher education;*
- *provide technical guidance and supervision in the development of vocational competency for vocational lecturers, other vocational educators, and vocational educational personnel in vocational and professional higher education;*
- *prepare legal permits for foreign representative offices or foreign institutions conducting vocational and professional higher education;*
- *monitor, evaluate, and report in the field of institutions and resources of vocational higher education; and*
- *handle administrative affairs within the Directorate.*





## **DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI**

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Direktorat Mitras DUDI dipimpin oleh direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

### **TUGAS**

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri.

### **FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang

kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

- pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- fasilitasi di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

**“PENDIDIKAN VOKASI MAMPU MENGUBAH MANUSIA MENJADI MERDEKA. VOKASI MAMPU MEMBUKA BANYAK PELUANG DAN PILIHAN KESEMPATAN DI DUNIA NYATA BAGI PARA LULUSANNYA.”**



***“VOCATIONAL EDUCATION HAS THE ABILITY TO EMPOWER INDIVIDUALS. IT OPENS UP MANY OPPORTUNITIES AND CHOICES IN THE REAL WORLD FOR ITS GRADUATES.”***

## KERJA SAMA SMK DENGAN DUDI

Jumlah SMK yang Melakukan Kerja Sama

**14.084** SMK

Jumlah Kerja Sama

**272.288** kerja sama

Jumlah DUDI yang Bermitra dengan SMK

**190.842** industri

Jumlah Bidang Usaha Mitra Industri SMK

**87** bidang usaha

Sumber: Dapodik 2022

### **DIRECTORATE OF PARTNERSHIP AND ALIGNMENT OF VOCATIONAL EDUCATION WITH BUSINESS AND INDUSTRY**

*The Directorate of Partnership and Alignment of Vocational Education with Business and Industry is an organizational unit within the Directorate General of Vocational Education that focuses on partnership and alignment with business and industry. The Directorate is led by a director who reports to and is responsible to the Director General of Vocational Education.*

#### **DUTIES**

*The Directorate of Partnership and Alignment of Vocational Education with Business and Industry has the task to formulate and implement policies in the areas of partnership and alignment of vocational education with business and industry.*

#### **FUNCTIONS**

*In carrying out its duties, the Directorate of Partnership and Alignment of Vocational Education with Business and Industry performs the following functions:*

- *prepare the formulation of policies in the field of partnership and alignment of vocational education with business and industry;*
- *implement policies in the field of partnership and alignment of vocational education with business and industry;*
- *facilitate in the field of partnership and alignment of vocational education with business and industry;*





- *provide technical guidance and supervision in the field of partnership and alignment of vocational education with business and industry;*
- *monitor, evaluate, and report in the field of partnership and alignment of vocational education with business and industry; and*
- *handle administrative affairs within the Directorate.*

## SUMMARY OF COLLABORATIONS BETWEEN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS (SMK) AND BUSINESS AND INDUSTRY:

The number of vocational schools involved in collaborations is

**14,084** SMKs

The total number of collaborations between SMKs and business/industry is

**272,288** collaborations

The number of industry partners for SMKs is

**190,842** industries

The collaborations cover

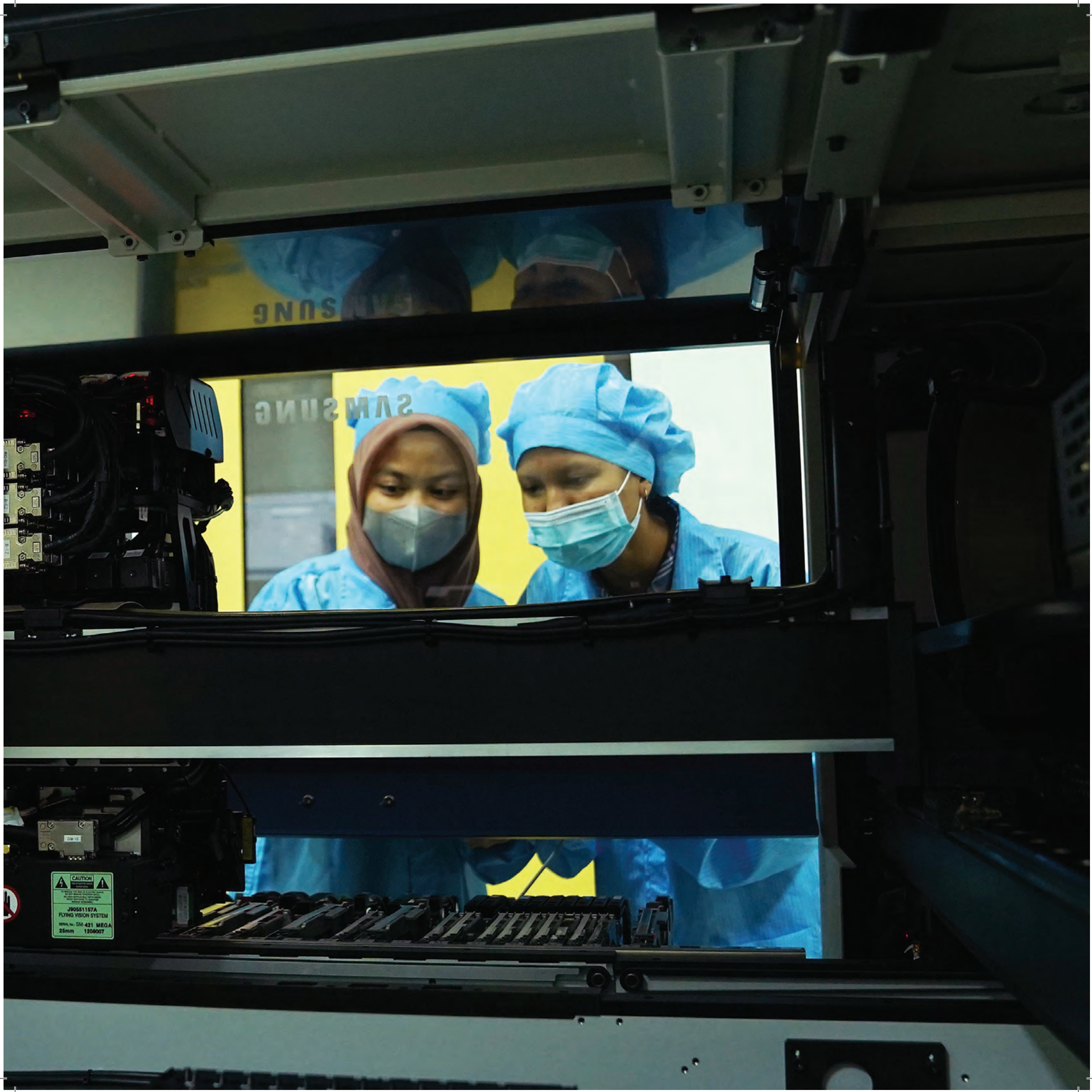
**87** different industries

Data source: Basic Education Data (Dapodik), 2022



# IKHTIAR MENUJU KEMAJUAN

*EFFORTS TOWARD  
DEVELOPMENT*



## COMPETITIVE FUND

Pendidikan tinggi vokasi memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan *technical skills* sesuai dengan kebutuhan industri. Keunggulan SDM diharapkan akan meningkatkan daya saing bangsa yang dapat diukur dari tingkat kesiap bekerja dan keterserapan lulusannya.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Kampus Merdeka sebagai indikator transformasi pendidikan tinggi dalam rangka perubahan global. Implementasi kebijakan Kampus Merdeka diturunkan dalam sejumlah program-program unggulan, salah satunya adalah program Competitive Fund.

Menjadi bagian dari Merdeka Belajar Episode ke-11: Kampus Merdeka Vokasi, Competitive Fund merupakan program bantuan pengembangan institusi yang bertujuan untuk mendorong, mempercepat, dan memfasilitasi perguruan tinggi vokasi bertransformasi menjadi perguruan tinggi unggul, berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui penyiapan SDM dan melakukan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja/industri.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 2021, program Competitive Fund vokasi ini telah berhasil mendorong pendidikan tinggi vokasi untuk melakukan berbagai transformasi dengan meningkatkan tata kelola dan kemitraan perguruan tinggi vokasi, meningkatkan inovasi dan wahana pembelajaran melalui *project based learning* (PBL), serta mengembangkan kampus merdeka mandiri.

## COMPETITIVE FUND

*Vocational higher education plays a crucial role in preparing human resources (HR) with technical skills that align with industry needs. The excellence of these HR is expected to enhance the nation's competitiveness, which can be measured by their readiness for employment and graduate employability.*

*On the other hand, the Minister of Education, Culture, Research, and Technology has established the Kampus Merdeka (Emancipated Campus) policy as an indicator of higher education transformation in the context of global changes. The implementation of the Emancipated Campus policy is carried out through several flagship programs, one of which is the Competitive Fund program.*

*As part of Emancipated Learning Episode 11, the Competitive Fund is a development assistance program for institutions aimed at encouraging, accelerating, and facilitating the transformation of vocational higher education institutions into excellent institutions that contribute to enhancing the nation's competitiveness through HR preparation and relevant learning innovations in line with the needs of the working world/industry.*

*Since its initial launch in 2021, the Competitive Fund program for vocational higher education institutions has successfully encouraged vocational higher education to undergo various transformations by improving governance and partnerships of vocational institutions, enhancing innovation and learning platforms through Project Based Learning (PBL), and developing self-sustaining emancipated campuses.*



# iisma

Indonesian international  
student mobility awards  
for Vocational Students



The University of Notre Dame  
Australia



Curtin University  
Australia



North Metropolitan TAFE  
Australia



Phoenix Academy  
Australia



South Metro TAFE  
Australia



Edith Cowan University  
Australia



The University of Western  
Australia



Murdoch University  
Australia



La Trobe University  
Australia



Deakin University  
Australia



Swinburne University of Technology  
Australia



Ming Chi University of Technology  
Taiwan



Cheng Shiu University  
Taiwan



Yuan Ze University  
Taiwan



National Formosa University  
Taiwan



Lunghwa University of Science and  
Technology Taiwan



Chung Yuan Christian University  
Taiwan



National Pingtung University of Science  
and Technology Taiwan



Minghsin University of Science and  
Technology Taiwan



National Taiwan Normal University  
Taiwan



Asia University  
Taiwan



Cranfield University  
United Kingdom



Teesside University  
United Kingdom

## **IISMA** *Indonesian International Students Mobility Awards*

Salah satu dukungan untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi diwujudkan dengan meluncurkan program pertukaran mahasiswa *Indonesian International Students Mobility Awards* (IISMA). Sebagai salah satu program *flagship* dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, IISMA merupakan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan.

Sebagai program *student mobility*, program IISMA memungkinkan mahasiswa Indonesia di semester IV-VI berkesempatan merasakan pengalaman pembelajaran dan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi terkemuka yang masuk dalam top 100 dunia. Melalui IISMA mahasiswa dapat mempelajari mata kuliah yang tidak mesti linear dengan program studi mereka di kampus asal.

Bagi mahasiswa vokasi, program IISMA telah membuka kesempatan bagi mereka untuk berkegiatan di industri-industri kelas dunia yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, program IISMA telah menghasilkan generasi muda calon pemimpin bangsa dengan perubahan pola pikir dan perilaku sebagai warga global. Program ini juga didesain untuk menyiapkan agen-agen perubahan. Peserta diharapkan menjadi kelompok intelektual yang kuat dan mendominasi perkembangan Indonesia di masa depan.

Sejak diluncurkan pada 2021, program pertukaran pelajar IISMA telah dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa vokasi. Pada 2022, tercatat ada 409 mahasiswa dari 64 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (PTPPV) telah merasakan manfaat dari program tersebut. Tahun 2023, jumlah mahasiswa vokasi bertambah menjadi 560 mahasiswa.

Para mahasiswa tersebut telah merasakan manfaat dari belajar di 140 perguruan tinggi kelas dunia dari sekitar 27 negara serta merasakan langsung industri-industri kelas dunia yang menjadi mitra dari perguruan tinggi tujuan. Program ini juga telah menjadi pemantik sekaligus jembatan bagi terciptanya kerja sama internasional.



## **IISMA** *Indonesian International Students Mobility Awards*

*One of the supports to improve the quality of vocational education is manifested through the launch of the Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA) program. As one of the flagship programs of the Emancipated Learning and Campus, IISMA is a collaboration between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (MoECRT) and the Education Fund Management Agency (LPDP) under the Ministry of Finance.*

*As a student mobility program, IISMA provides an opportunity for Indonesian students in their fourth to sixth semesters to experience learning and take courses at leading universities ranked in the top 100 in the world. Through IISMA, students can study courses that may not necessarily be directly related to their study programs at their home campuses.*

*For vocational students, the IISMA program has opened up opportunities for them to engage in world-class industries collaborating with partner*

*universities abroad.*

*In its implementation, the IISMA program has produced a generation of young future leaders with a change in mindset and behavior as global citizens. The program is also designed to prepare change agents. Participants are expected to become a strong intellectual group that dominates Indonesia's future development.*

*Since its launch in 2021, the IISMA student exchange program has been beneficial for vocational students. In 2022, it was recorded that 409 students from 64 vocational education institutions had benefited from the program. In 2023, the number of vocational students increased to 560. These students have experienced the benefits of studying at 140 world-class universities from approximately 27 countries and directly experiencing world-class industries that are partners of the destination universities. The program has also served as a catalyst and bridge for international cooperation.*





# iisma

Indonesian international  
student mobility awards  
for Vocational Students



University of Portsmouth  
United Kingdom



City of Glasgow College  
United Kingdom



Coventry University  
United Kingdom



University of Nottingham  
United Kingdom



Arts University Bournemouth  
United Kingdom



University of Strathclyde  
United Kingdom



Kangwon National University  
Korea Selatan



Daegu Catholic University  
Korea Selatan



Korea University of Technology and  
Education Korea Selatan



Ulsan College  
Korea Selatan



Hanbat National University  
Korea Selatan



Woosong University  
Korea Selatan



Universiti Teknologi Malaysia  
Malaysia



Universiti Tun Hussein Onn  
Malaysia



Universiti Teknikal Malaysia Melaka  
Malaysia



Universiti Malaysia Pahang  
Malaysia



IU International University of Applied  
Sciences Jerman



Osnabrück University of Applied  
Sciences Jerman



Selcuk University  
Turki



Universite Polytechnique Haut-de-France  
Prancis



Lincoln Welding School  
USA



University of Pecs  
Hungaria



National University of Ireland-Galway-  
Shannon College of Hotel Management



## MATCHING FUND

Seiring dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi yang saat itu masih bernama Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi meluncurkan program Dana Padanan (Matching Fund) Vokasi.

Program Matching Fund Vokasi menjadi implementasi dari Merdeka Belajar Episode 11. Program ini merupakan salah satu bentuk penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi vokasi dan industri untuk menciptakan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi pada perguruan tinggi vokasi.

Program ini menekankan pada tiga aspek, yakni pengembangan pusat unggulan teknologi, hilirisasi produk, dan pengembangan startup kampus vokasi yang bekerja sama dengan industri. Program

Matching Fund Vokasi telah melahirkan produk-produk berupa purwarupa dan berbagai inovasi yang menjawab kebutuhan industri dan masyarakat.

Program pendanaan ini bersifat kompetitif berdasarkan proposal yang diusulkan oleh dosen yang telah memiliki NIDN maupun NIDK dari perguruan tinggi vokasi, baik negeri maupun swasta di bawah Kemendikburistek. Institusi penerima juga telah memiliki rekam jejak pelaksanaan proses pembelajaran dan penelitian terapan yang berorientasi menghasilkan produk, baik barang atau jasa berstandar, prosedur, dan dilaksanakan dengan menggandeng industri.

Dari tahun ke tahun, program ini semakin diminati. Pada 2022, program Matching Fund Vokasi berhasil mengumpulkan 176 proposal reka cipta yang berasal dari 70 Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi (PTPPV) serta 156 mitra industri.

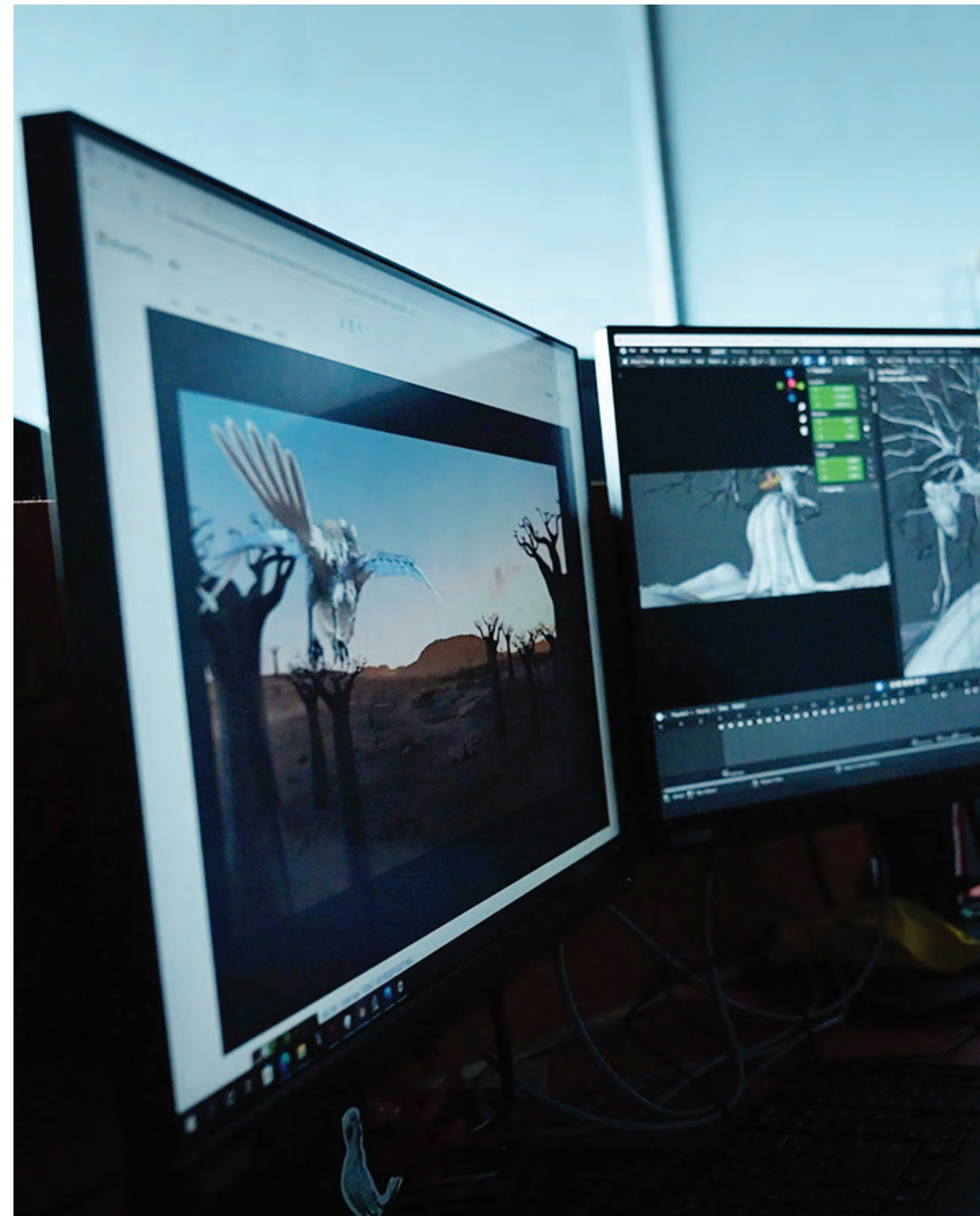


## **MATCHING FUND**

*Along with the implementation of the Emancipated Learning and Campus policy, in 2021, the Directorate General of Vocational Education, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (MoECRT) through the Academic Directorate of Vocational Higher Education, formerly known as the Directorate of Vocational and Professional Higher Education, launched the Vocational Matching Fund program.*

*The Vocational Matching Fund program is an implementation of Emancipated Learning Episode 11. This program represents a strengthening of collaboration between vocational higher education institutions and industries to create a collaborative ecosystem for research and innovation in vocational higher education.*

*The program emphasizes three aspects: the development of technology centers of excellence, product commercialization, and the development*





*of vocational campus startups in collaboration with industries. The Vocational Matching Fund program has produced prototypes and various innovations that address industry and community needs.*

*This funding program is competitive based on proposals submitted by lecturers who have an NIDN (lecturer identification number) or NIDK (lecturer certification number) from vocational higher education institutions, both public and private under MoECRT. Recipient institutions are required to have a track record of implementing learning and applied research processes oriented towards producing standardized products, procedures, and conducted in collaboration with industries.*

*Year after year, this program has gained increasing interest. In 2022, the Vocational Matching Fund program successfully collected 176 invention proposals from 70 vocational higher education institutions and had 156 industry partners.*



**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DALAM ANGKA**

**725.000+**

mahasiswa sudah terdaftar dan memiliki akun Kampus Merdeka

---

**14.000+**

sekolah dari seluruh Indonesia telah menerima manfaat bantuan pengajaran

---

**3.000+**

organisasi dan perusahaan telah mendaftarkan diri sebagai mitra

---

**1.300+**

perguruan tinggi telah berpartisipasi di berbagai program Kampus Merdeka

---



## MSIB

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM telah memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa Indonesia untuk mengikuti berbagai program di luar kampus guna mendukung pengembangan diri. Salah satunya melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang diluncurkan tahun 2021.

MSIB merupakan salah satu program Kampus Merdeka yang dirancang untuk memastikan mahasiswa mendapatkan keterampilan dan kompetensi utama, terbaik, dan terkini untuk menghadapi dunia masa depan. Melalui MSIB, mahasiswa bisa belajar dan mendapat pengalaman nyata di dunia profesional. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi vokasi semakin siap memasuki dunia kerja.

Melalui MSIB mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar kampus selama satu semester. Aktivitas selama magang maupun studi independen di industri kemudian dikonversikan ke dalam 20 SKS mata kuliah yang diambil.

Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2021, program MSIB telah dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa vokasi. Program ini berhasil mengakselerasi tingkat ke bekerjaan lulusan vokasi. Rata-rata peserta program MSIB dari perguruan tinggi vokasi memiliki waktu tunggu sekitar empat bulan serta memperoleh gaji lebih tinggi, yakni sekitar 0,72 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).

## MSIB

*The Emancipated Learning and Campus policy has provided ample opportunities for Indonesian students to participate in various off-campus programs to support their personal development. One of these programs is the Internship and Certified Independent Study (Magang dan Studi Independen Bersertifikat or MSIB), which was launched in 2021.*

*MSIB is one of the Emancipated Campus programs designed to ensure that students acquire essential, high-quality, and up-to-date skills and competencies to face the future world. Through MSIB, students can learn and gain real-world experience in the professional realm. Consequently, vocational college graduates become better prepared to enter the workforce.*

*Through MSIB, students have the opportunity to engage in off-campus learning experiences for one semester. The activities during internships or independent studies in industries are then converted into 20 credit hours that are recognized as part of their coursework.*

*Since its implementation in 2021, the MSIB program has proven to be beneficial for vocational students. The program has successfully accelerated the employment rate of vocational graduates. On average, MSIB participants from vocational institutions experience a waiting period of about four months before finding employment, and they receive higher salaries, approximately 0.72 times the Regional Minimum Wage.*

## PRAKTISI MENGAJAR

Indonesia hanya memiliki 11,9 persen praktisi mengajar di perguruan tinggi. Angka ini lebih kecil dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (56%), Brunei Darussalam (42,5%), Malaysia (26,8%), dan Filipina (25,8%).

Kehadiran praktisi di perguruan tinggi vokasi sendiri merupakan hal penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dan dunia industri maupun profesional. Kehadiran praktisi dapat mendorong proses pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan mahasiswa yang lebih relevan.

Untuk itulah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi program Praktisi Mengajar. Melalui program ini para praktisi dapat berbagi kepakaran mereka kepada para mahasiswa vokasi. Para praktisi dapat berbagi perspektif dan persepsi masyarakat kampus untuk memahami dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, relevansi keahlian lulusan perguruan tinggi vokasi dengan kebutuhan industri bisa meningkat.

Program Praktisi Mengajar telah diluncurkan sejak tahun 2022 sebagai salah satu program ung-

gulan dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini menarik keterlibatan praktisi ahli di berbagai bidang dalam proses pembelajaran di kampus melalui kolaborasi dengan dosen pengampu mata kuliah. Keuntungan dari program ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, perguruan tinggi, praktisi, hingga perusahaan.

Bagi mahasiswa, mereka dapat mulai membangun jejaring dunia usaha dan dunia industri, pengalaman nyata, serta rekognisi. Sementara bagi bagi praktisi, program ini dapat memberikan kompensasi mengajar dan menjaring bakat muda. Para praktisi juga ikut mendidik generasi muda Indonesia agar lebih memahami bagaimana dunia kerja beroperasi sehingga mahasiswa akan lebih siap untuk terjun ke dunia kerja atau berwirausaha.

Dari sisi perusahaan, keterlibatan dalam program ini dapat menjaring sumber daya manusia yang unggul lebih awal, menggerakkan kemajuan pendidikan, dan membangun citra institusi yang positif di mata publik.





(Sumber: Instagram/therealdisastr)

Dian Sastro Wardoyo yang memiliki profesi sebagai artis sedang menularkan ilmunya kepada para mahasiswa di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia.



(Foto: Istimewa)

Reza Rahadian seorang aktor senior ikut terlibat menjadi praktisi mengajar di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia.

## TEACHING PRACTITIONERS

*Indonesia has only 11.9 percent of teaching practitioners in higher education, a lower figure compared to other Southeast Asian countries such as Singapore (56 percent), Brunei Darussalam (42.5 percent), Malaysia (26.8 percent), and the Philippines (25.8 percent).*

*The presence of teaching practitioners in vocational higher education is crucial to enhance the relevance of vocational education to the industrial and professional world. The presence of practitioners can drive the learning process and ensure that students acquire knowledge that is more relevant to their field.*

*In line with this, the Directorate General of Vocational Education, under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (MoECRT), has initiated the Teaching Practitioners program. Through this program, practitioners can share their expertise with vocational students. Practitioners can provide insights and perspectives from the industry to help students understand the real-world work environment. This way, the alignment between the skills of vocational graduates and industry needs can be improved.*

*The Teaching Practitioners program was launched in 2022 as one of the flagship programs under the Emancipated Learning and Campus policy framework. The program aims to involve expert practitioners from various fields in the teaching and learning process at universities through collaboration with course instructors. The benefits of this program can be experienced by various stakeholders, including students, universities, practitioners, and companies.*

*For students, they can start building networks in the business and industrial world, gain real-world experience, and receive recognition. Meanwhile, for practitioners, the program provides an opportunity to compensate for teaching and identify young talents. Practitioners also contribute to educating the younger generation in Indonesia to better understand how the working world operates, thus preparing students for employment or entrepreneurship.*

*From the perspective of companies, involvement in this program enables them to identify excellent human resources at an early stage, contribute to the advancement of education, and build a positive institutional image in the eyes of the public.*

## SMK PUSAT KEUNGGULAN (SMK PK)

SMK PK adalah salah satu program prioritas dari Ditjen Pendidikan Vokasi. Program SMK Pusat Keunggulan menjadi program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu untuk meningkatkan kualitas dan kinerja melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam mewujudkan *link and match*, serta peningkatan kualitas *link and match* satu program keahlian di sekolah tersebut. Program ini mendorong kemitraan dan penyelarasan antara SMK dengan dunia kerja dan industri. Hadirnya SMK PK pada 2021 tak terlepas dari penguatan program SMK sebelumnya, yakni Revitalisasi SMK. Program Revitalisasi Sekolah lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam perkembangannya, program SMK Pusat Keunggulan kemudian bertransformasi menjadi program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan pada 2022. Program ini semakin menguatkan peran serta industri dalam mewujudkan transformasi pendidikan vokasi di jenjang sekolah kejuruan.

## CENTER OF EXCELLENCE VOCATIONAL HIGH SCHOOL (SMK PK)

*Center of Excellence Vocational High School (SMK PK) is one of the priority programs of the Directorate General of Vocational Education. It is a development program for vocational high schools with specific expertise to enhance quality and performance through improving the capacity of school principals in achieving link and match, as well as enhancing the quality of link and match within a particular vocational program at the school. The program encourages partnerships and alignment between vocational high schools and the world of work and industry. The establishment of SMK PK in 2021 is closely related to the strengthening of previous vocational school programs i.e. the Revitalization of Vocational Schools. The School Revitalization program was initiated through Presidential Instruction Number 9 of 2016 regarding the Revitalization of Vocational High Schools.*

*In its development, SMK PK program has evolved into the Center of Excellence Vocational High School program with Matching Scheme Support in 2022. This program further strengthens the involvement of industries in realizing the transformation of vocational education at the vocational high school level.*







**PENUTUP**  
CLOSING

**D**alam rangka perwujudan cita-cita dari pembangunan yang berfokus pada SDM, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki mandat yang besar untuk mengelola pendidikan vokasi di Indonesia. Kehadiran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan sebuah tantangan untuk menjadikan pendidikan vokasi yang lebih baik hingga mampu melahirkan SDM unggul untuk menyongsong era Indonesia Emas, 2045.

Berbagai tantangan tersebut adalah mandat yang harus diemban oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan, serta Direktorat Kemitraan dan Penyelesaian Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Selain memberikan gambaran tentang profil Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kehadiran buku ini sekaligus menjadi upaya sosialisasi pendidikan vokasi kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan bisa memahami secara utuh tentang latar belakang, maksud, dan tujuan dari dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Dengan pemahaman yang utuh tentang peran vital pendidikan vokasi termasuk program-program unggulan yang dijalankan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, maka diharapkan pendidikan vokasi akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia ke depannya karena sesungguhnya Vokasi Kuat, Menguatkan Indonesia.







*In order to realize the aspirations of development that focuses on human resources, the Directorate General of Vocational Education has been entrusted with the significant mandate of managing vocational education in Indonesia.*

*The presence of the Directorate General of Vocational Education under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology poses a challenge to improve vocational education, ultimately producing skilled human resources to embrace Indonesia's Golden Era in 2045.*

*Various challenges lie ahead, which must be undertaken by the Directorate General of Vocational Education through its constituent units: the Directorate of Vocational High Schools (SMK), the Academic Directorate of Vocational Higher Education, the Directorate of Institutional and Resource Development for Vocational Higher Education, the Directorate of Courses and Training, as well as the Directorate of Partnership and Alignment of Vocational Education with the Business and Industry.*

*This book not only provides an overview of the Directorate General of Vocational Education's profile but also serves as an effort to socialize vocational education among the public. Consequently, the public will gain a comprehensive understanding of the background, purpose, and objectives behind the establishment of the Directorate General of Vocational Education.*

*By comprehending the vital role of vocational education, including the flagship programs implemented by the Directorate General of Vocational Education, it is hoped that vocational education will become the primary choice for the Indonesian society in the future because, indeed, Strong Vocational Education Strengthens Indonesia.*



## **UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

- 1. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya**  
Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
- 2. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik**  
Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara
- 3. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata**  
Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
- 4. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian**  
Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
- 5. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri**  
Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat
- 6. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika**  
Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
- 7. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi**  
Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan







Directorate General of Vocational Education  
The Ministry of Education, Culture, Research and Technology  
The Republic of Indonesia

2023

  @KamiVokasi

  Direktorat Jenderal  
Pendidikan Vokasi

[www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)





Directorate General of Vocational Education  
The Ministry of Education, Culture, Research and Technology  
The Republic of Indonesia

2023